

KEJAKSAAN DI ERA DIGITALISASI



Eko Bambang Sinudarsono, A.Md.Kom

Alumni Prodi Sistem Informasi Akuntansi UTDI (Dahulu STMIK AKAKOM) 2018

Saat ini bekerja di Kejaksaan Agung Republik Indonesia

SEBAGAI lembaga penegak hukum, Kejaksaan harus terus mengikuti perkembangan zaman terutama di era digitalisasi saat ini.

"Digitalisasi Kejaksaan sekarang ini menerapkan tata kelola perkantoran berbasis teknologi informasi atau elektronik, mulai dari persuratan dan administrasi perkara serta pelayanan publik di Kejaksaan. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi di Kejaksaan merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan tugas dan fungsi yang berbasis digital elektronik dalam rangka meningkatkan transparansi dan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien"

Kemajuan dan inisiatif digital yang sudah mulai diterapkan di Kejaksaan yaitu mengembangkan sistem informasi dengan mengacu pada proses dan pemanfaatan teknologi untuk melaksanakan tugas diantaranya yaitu:

1. Sistem Informasi Persuratan Dinas Elektronik (SIPEDE) dan memulai pemanfaatan tanda tangan digital;
2. Case Management System (CMS) yaitu untuk administrasi penanganan perkara tindak pidana umum (Pidum) dan tindak pidana khusus (Pidus). CMS Pidum saat ini juga untuk mendukung sistem database penanganan perkara tindak pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi



3. (SPPT-TI) yang merupakan salah satu prioritas nasional aksi pencegahan korupsi;
4. MYSIMKARI yaitu untuk administrasi Bidang Pembinaan yang berhubungan dengan Kepegawaian;
5. Pengembangan Case Management System (CMS) Perdata Dan Tata Usaha Negara dan Aplikasi Halo JPN;
6. Aplikasi E-Tilang Kejaksaan adalah data perkara yang telah diputus oleh Pengadilan;
7. Pemanfaatan teknologi informasi terkait sidang secara online, menggunakan perangkat video conference atau dengan menggunakan VICA Kejaksaan.

Mendasari pada pentingnya penerapan paerubahan pola pikir (mind set) dalam pelak-

sanaan tugas, maka pada organisasi yang didalamnya terdapat unsur "Manusia" sebagai "Pelaku Perubahan" yang kiranya dipandang sebagai sumber daya utama penggerak organisasi yang memiliki peran penting untuk menentukan keberhasilan mewujudkan visi dan misi besar yang hendak dicapai.

Bertolak dari hal tersebut, sumber daya manusia atau disebut ASN berperan sangat signifikan dari mulai dilakukannya proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai pada proses pengendalian organisasi demi tercapainya tujuan organisasi secara optimal, untuk itu tanpa kreativitas dan inovasi, organisasi apapun termasuk Kejaksaan akan menjadi kurang berkembang. Dimana dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya akan selalu menjadi sorotan masyarakat, sehingga dengan demikian, tidak ada pilihan lain selain menguatkan kelembagaan Kejaksaan dengan dukungan sdm yang berkualitas, kreatif, dan inovatif. Dengan kemudahan ini tentunya mau tidak mau harus beradaptasi dengan teknologi yang semakin berkembang pesat.

Selain itu, Jaksa Agung juga telah melun-

UNIVERSITAS TEKNOLOGI DIGITAL INDONESIA

www.utdi.ac.id

Pengembalian Aset, Perkuat Sistem Antikorupsi

YOGYA (KR) - Para pelaku korupsi di Indonesia selama ini terlihat tidak takut dengan ancaman hukuman penjara. Mereka telah berhitung dengan perbuatan korupsi yang dilakukan akan jauh memperkaya mereka, dibandingkan pensiun dengan cara wajar. Oleh karena itu, yang ditakutkan para koruptor justru pemiskinan dengan penyitaan aset yang diduga hasil korupsi.

"Karenanya, penguatan sistem antikorupsi akan diwujudkan melalui strategi optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan secara menyeluruh serta pemanfaatannya untuk mendukung pembangunan," tegas Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang



Narasumber foto bersama usai Diskusi Terbuka di UAJY.

Bukti dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Mungki Hadi Pratikto dalam Diskusi Terbuka, Rabu (20/9) di kampus UAJY. Bersama narasumber lainnya, Dosen dan Lawyer Bibianus Hengky Widhi Antoro SH MH membawakan materi Optimalisasi Pemulihan

Kerugian Keuangan Negara melalui Upaya Asset Recovery dengan moderator Mahasiswa FH UAJY Ketua Komunitas Antikorupsi UAJY #7 Rafael Felix Kurniawan. Sebelumnya acara dibuka Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak selaku pembicara kunci.

"Sesuai Peraturan Jaksa Agung (Perja) 3/2014, pemuliharaan aset adalah proses yang meliputi penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan, pengembalian dan pelepasan aset tindak pidana atau barang milik negara yang dikuasai pihak lain kepada korban atau yang berhak pada setiap tahap penegakan hukum," terangnya.

Sedangkan, Bibianus menyebutkan, External Legal Culture berupa sikap masyarakat yang enggan memberikan informasi adanya pelaku tindak pidana korupsi atau harta benda yang dimiliki oleh pelaku kejahatan di lingkungannya menunjukkan adanya budaya hukum masyarakat yang belum mendukung penegakan hukum tindak pidana korupsi. (Vin)-f

33.902 Desa Punya Perpustakaan

JAKARTA (KR) - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menyebutkan dari 75.265 desa sebanyak 33.902 desa atau 45,04 persen saat ini memiliki fasilitas perpustakaan atau taman bacaan.

Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa PDTT Sugito menyatakan, dari 33.902 desa itu sebanyak 30.177 desa di antaranya telah mampu memanfaatkan dan mengoptimalkan fasilitas perpustakaan atau taman bacaan yang dimiliki. "Pengetahuan masyarakat akan berdampak pada upaya menggerakkan berbagai potensi ekonomi maupun menjaga lingkungan di desa," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi X DPR RI, Rabu (20/9).

Sugito menjelaskan, aspek pendidikan merupakan investasi penting bagi masa depan bangsa, karena mampu mencetak sumberdaya manusia yang berkualitas dan ber-

daya saing. Oleh sebab itu, ia menuturkan, Kemendes PDTT juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan literasi masyarakat karena akan berdampak pada tingkat ekonomi, kesejahteraan hingga kelestarian lingkungan di desa. "Maka pemerintah desa bersama-sama memastikan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan yang berkualitas bagi warga desa serta akses yang mudah bagi desa terhadap layanan pendidikan," katanya.

Upaya yang dilakukan Kemendes PDTT untuk menciptakan SDM yang berkualitas adalah dengan memastikan adanya akses yang mudah dari anak-anak di desa menuju PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dengan akreditasi minimal B.

Selain itu, akses anak-anak di desa menuju pesantren juga sudah mencapai 100 persen serta angka melek aksara latin dan non latin pada penduduk usia di atas 15 tahun sudah mencapai 100 persen. (Ant)-f

EKONOMI

AMANKAN PASOKAN BAHAN BAKU Pupuk Indonesia Grup Teken Kontrak Jual Beli Gas

SLEMEN (KR) - PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui anak usahanya melakukan penandatanganan kontrak perjanjian jual beli gas (PJBG), dengan beberapa perusahaan migas. Hal itu untuk mendukung keberlangsungan dan peningkatan kapasitas produksi pupuk di masa akan datang.

Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi menyatakan bahwa komitmen pemenuhan pasokan gas bagi industri pupuk merupakan komitmen bersama dalam mendukung program prioritas Pemerintah seperti ketahanan pangan nasional hingga Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Kami menyambut baik dukungan penuh pemerintah untuk pemenuhan gas bagi Pupuk Indonesia Grup. Penandatanganan perjanjian jual beli gas yang dilakukan oleh anak perusahaan Pupuk Indonesia ini tentunya akan berdampak positif bagi industri pupuk nasional," demikian ungkap Rahmad acara International Convention Indonesia Upstream Oil & Gas 2023 (IOG) di Bali, kemarin.

Penandatanganan dilakukan Dirut PT Pusri Palembang (PSP) Tri Wahyudi Saleh, Dirut PT Pupuk Kaltim (PKT) Budi Wahyu Soesilo, dan Direktur Portofolio & Pengembangan Usaha PT Petrokimia Gresik (PG) Digna



Pupuk Indonesia grup menandatangani kontrak PJBG.

Jatiningih dengan beberapa Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) seperti PT Medco E&P Indonesia, PT Medco E&P Lematang, PT Pertamina EP Cepu, Genting Oil Kasuri Pte. Ltd, dan Husky CNOOC Madura Ltd. Turut menyaksikan penandatanganan adalah Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto, Direktur Portofolio & Pengembangan Usaha Pupuk Indonesia, Jamsaton Nababan.

Sementara itu, Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto mengatakan bahwa komitmen pemenuhan pasokan gas menjadi hal penting dalam mendukung program hilirisasi nasional. Menurut Dwi, Pemerintah akan memberikan insentif demi meningkatkan produksi gas khususnya kepada lapangan-lapangan minyak dan gas (migas).

Anak perusahaan Pupuk Indonesia yang melakukan penandatanganan jual beli gas adalah PT

Pupuk Kaltim dengan Genting Oil Kasuri Pte. Ltd dengan volume 102 MMSCFD. Aliran gas baru akan dimulai pada kuartal IV tahun 2027. Perjanjian ini bertujuan untuk memastikan keberhasilan proyek pabrik amoniak urea kawasan industri pupuk Fakfak, Papua Barat.

Selanjutnya, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang melakukan kerjasama jual beli gas dengan Medco E&P Indonesia dan Medco E&P Lematang dengan volume harian sekitar 5 BBTUD sampai 18 BBTUD yang akan dimulai pada tahun 2023.

PT Petrokimia Gresik melakukan kerjasama jual beli gas dengan dua perusahaan sekaligus, yaitu Pertamina EP Cepu dengan volume gas sebesar 15 MMSCFD. Selanjutnya dengan Husky CNOOC Madura Ltd, di mana sebagai bentuk pengamanan pasokan gas jangka Panjang apabila sumur-sumur gas eksisting telah mengalami deklinasi. (Sni)-d

MINIMAL 40 PERSEN ANGGARAN

Gunakan Produk Dalam Negeri, Hindari Bajakan

BOGOR (KR) -Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), menacanakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Hal ini terus disosialisasikan bersamaan dengan disusunnya peraturan badan untuk menggunakan produk dalam negeri baik berupa barang maupun jasa. Demikian kata Plt. Sekretaris Utama, Nur Tri Aries Suestiningtyas kepada para petugas pengelolaan anggaran BRIN pada Workshop Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Cibinong kemarin.

"Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) harus terus melakukan komunikasi dalam pemilihan barang dan jasa yang akan digunakan, karena merupakan kewajiban tim pengelolaan anggaran untuk memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri," jelasnya.

Menurut Nur Tri Aries selain penggunaan produk dalam negeri, juga harus menggunakan jasa yang berasal dari dalam negeri dan menghindari barang bajakan.

"Hindari barang bajakan dengan secara proaktif cari tahu mengenai

acuan bagi segenap pejabat dan pegawai terutama pengelola anggaran di lingkungan BRIN dalam mendorong dan menciptakan ekosistem penggunaan produksi dalam negeri," tutupnya.

Inspektur 1 BRIN, Arief Hediando, menyampaikan bahwa gerakan penggunaan produk dalam negeri sudah disuarakan sejak presiden pertama Indonesia. Diawali program Aku Cinta Indonesia, 100% Indonesia hingga Bangsa Buatan Indonesia.

"Fundamental ekonomi kita lemah, karena kita tergantung dengan produk produk impor, hal ini sangat terasa ketika kita mengalami krisis ekonomi di tahun 1997 - 1998. Namun berbeda dengan keadaan yang terjadi pada krisis yang terjadi di era pandemi Covid, pada masa pandemi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan produk yang eksis di era pandemi covid," jelas Arief.

(Ati)-d

Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan dengan APBN

SLEMEN (KR) - APBN yang memiliki fungsi alokasi, distribusi, shock absorber mengamankan sasaran pembangunan ekonomi yang meliputi penurunan tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, gini ratio, indeks pembangunan manusia, nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. Untuk pencapaian Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, APBN hadir antara lain untuk penendalian inflasi, pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan prevelensi stunting dan peningkatan investasi.

Hal ini disampaikan Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan (DJPB) DIY Agung Yulianta dalam Executive Dialogue bertema 'Mengawal Pencapaian Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Melalui Belanja Berkualitas' di Hotel Grand Diamond Yogyakarta, Rabu (20/9).

Kegiatan ini dihadiri para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) baik secara luring maupun daring.

"Belanja pengendalian inflasi melalui program Infrastruktur Konektivitas, Ketahanan Sumber Daya Air, Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, serta Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik dengan pagu Rp1,47 triliun dan realisasi Rp 407,30 miliar atau 27,71% dari pagu, dengan rata-rata capaian fisik 62,71%. Alokasi APBN untuk penurunan angka stunting di wilayah DIY Rp 62,84 miliar dengan realisasi Rp 30,72 miliar atau 48,89% dari pagu dengan rata-rata penyelesaian fisik 58,55% per Agustus 2023," paparnya.

Agung menyatakan pengentasan kemiskinan ekstrim antara lain melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), dengan pagu Rp 130,96 miliar dan realisasi Rp 51,12 miliar atau 39,03% pagu dengan total jumlah KPM 18.933 kepala keluarga serta peningkatan rumah layak huni dan infrastruktur permukiman berbasis masyarakat

yang dialokasikan sebesar Rp 909,29 miliar dengan realisasi Rp 489,74 miliar atau 53,5% dari pagu dan rata-rata capaian fisik 50,6%.

"Sementara itu, belanja untuk peningkatan investasi antara lain melalui Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarpras PTN, Bendungan, Dukungan Penanganan Jembatan Daerah, alat kesehatan, Gedung Pelayanan Kesehatan Ibu dan anak, dengan pagu Rp 4,08 triliun yang realisasi sampai dengan Agustus Rp 1.814,67 miliar atau 44,48% dari pagu dengan rata-rata penyelesaian Fisik 64,71%," paparnya.

Sebagai bentuk penghargaan dan memberikan motivasi untuk berkinerja lebih baik, Kanwil DJPB DIY menganugerahkan Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Award Semester I TA 2023 dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Award TA 2022. (Ira)-d